
**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PSAP
NOMOR 05 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG**

Rayzinsky C. Mandolang¹, David P. E. Saerang², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus
Bahu, Manado, 95115, Indonesia
E-mail : Clarentsmandolang3@gmail.com

ABSTRACT

Inventory is equipment or goods that are in a government agency to be used to support or will be provided as a service to the community. Inventory is very important for companies, such as trading companies, manufacturers, business organizations, and also government agencies which are included in current assets. This research aims to determine whether the inventory accounting treatment at the Bitung City Regional Revenue Agency is in accordance with PSAP No.5. The method used in this research is the descriptive qualitative method, a method that focuses on in-depth observation. From the results of this research, it can be shown that the inventory accounting treatment at the Bitung City Regional Revenue Agency is in accordance with Government Accounting Standards Statement No.05, seen from the classification, recognition, measurement, inventory costs and inventory disclosures, it is in accordance with PSAP No.05 Inventory Accounting.

Keywords: Accounting Treatment, Inventory Accounting, Inventory Recognition, Inventory Measurement, Inventory Expenses, Inventory Disclosure

1. PENDAHULUAN

Dalam pemerintahan di zaman sekarang dengan menciptakan pemerintahan yang baik serta akuntansi sektor publik sudah terus berkembang dengan baik sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan bagi pemerintah untuk publik, dengan tuntutan publik bagi pemerintah agar dapat profesional dalam mengelola dan mengefisienkan serta membuktikan transparansi dalam pemerintahan agar dapat membentuk suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan itu pemerintah terus mendorong beragam upaya dalam mendorong transparansi dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara dan salah satu kebijakan pengembangan pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan.

Tujuan pemerintah dalam pemasukan kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai acuan untuk dasar Pemerintahan daerah dalam rangka menyusun dan menggunakan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah yang di mana penyusunan kebijakan akuntansi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan akuntansi terkait dengan *financial statement* atau laporan keuangan dan kebijakan akuntansi terkait akun-akun yang di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 tentang Akuntansi Persediaan.

Persediaan ini mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk dipakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional dalam persediaan adalah sebuah aset lancar yang berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional contohnya barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang bekas pakai. Dengan tidak adanya persediaan dalam suatu instansi pemerintahan mungkin akan sulit dalam kegiatan-kegiatan operasional pelayanan bagi masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kinerja dalam instansi pemerintah tersebut. Pengertian Persediaan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Intansi ataupun perusahaan pasti menyiapkan persediaan untuk mempermudah atau memperlancar operasional perusahaan maupun instansi pemerintahan baik dalam produksi maupun penjualan atau pelayanan kepada masyarakat, termasuk persediaan barang habis pakai, barang tidak habis pakai dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan atau instansi pemerintahan tersebut dan sesuai dengan instansi atau perusahaan itu bergerak di bidang apa. Tidak adanya persediaan, perusahaan atau instansi pemerintahan akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung adalah Instansi Pemerintah Kota Bitung yang melayani di bagian pelayanan pajak dan retribusi daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak lainnya. Persediaan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional dalam bentuk pelayanan kepada publik. Persediaan juga merupakan aset lancar dalam bentuk komoditas atau peralatan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional pemerintah, seperti Barang Habis Pakai, Barang Tidak Habis Pakai, dan Barang Bekas Pakai. Tanpa persediaan akan sulit bagi suatu instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah pemerintahan yang besar dan luas, dengan tidak adanya persediaan kegiatan dalam instansi pemerintahan akan terganggu karena persediaan juga termasuk sebagai barang yang mendukung kegiatan administrasi di instansi pemerintah.

Untuk itu pengelolaan persediaan harus diperhatikan oleh instansi pemerintahan, karena pengelolaan persediaan pada instansi pemerintahan sifatnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan, dengan itu cara untuk mengurangi terjadi adanya kesalahan-kesalahan yaitu instansi harus mengontrol atau lebih memperhatikan penerapannya pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) 05 akuntansi persediaan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Ilmu akuntansi yang pada awalnya adalah ilmu yang berkembang dalam lingkungan bisnis yang di mana ada kepentingan yang lebih terhadap informasi yang bersifat keuangan yang sampai menjadi sangat penting bagi pengguna informasi tersebut guna menjadi profit sebagaimana pada dasarnya ilmu akuntansi tercipta. Karakteristik penting dari akuntansi yaitu identifikasi, pengukuran dan mengkomunikasikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan ekonomi suatu entitas kepada pihak yang memiliki kepentingan (Kieso *et al.*, 2020).

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah entitas yang di mana kegiatannya berhubungan dengan laporan keuangan suatu lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan dan juga akuntansi sektor publik berhubungan dengan upaya untuk menghasilkan barang serta jasa pelayanan kepada publik, dan juga akuntansi sektor publik dapat menjadi alat transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik yang di mana sektor publik dimaksud adalah lembaga pemerintahan daerah maupun pusat dan lembaga non-pemerintah. Menurut Halim (2014:18) hal ini merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah dan berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dwi Ratmono (2015) Dwi Ratmono mengemukakan yaitu sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.

2.3 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang bertujuan untuk mencari laba. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 11 di mana dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian sistematis dan prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang di mana telah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

2.5 Akuntansi Persediaan

Persediaan juga merupakan bagian paling penting dari suatu perusahaan dagang, manufaktur, organisasi bisnis, dan juga instansi di bidang pelayanan pemerintah yang masuk dalam aset lancar. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, mendefinisikan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau berupa perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi atau yang dalam perjalanan dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa. Metode pengukuran atau penilaian persediaan yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam menghitung penyimpanan persediaan, yaitu :

1. *First In First Out (FIFO)*

Metode first in first out (FIFO) adalah sebuah metode pencatatan persediaan yang membuat sebuah barang masuk pada urutan pertama harus keluar pada urutan pertama juga,

2. *Last In First Out (LIFO)*

Metode last in first out (LIFO) adalah suatu metode pencatatan persediaan yang bisa dibalik kebalikan dari metode first in first out (FIFO). Metode LIFO menerapkan dengan sistem barang yang masuk urutan paling terakhir akan dijual pada urutan paling pertama. Lalu untuk barang sudah ada sejak pertama akan dijual pada beberapa waktu kemudian.

3. *Rata-rata (Average)*

Metode average menggunakan persediaan barang yang sudah ada tanpa memperhatikan barang mana yang masuk pertama atau terakhir. Metode ini barang yang akan keluar dicatat berdasarkan rata-rata barangnya.

Ada dua metode untuk pencatatan persediaan, yaitu :

1. Pencatatan Periodik

Dalam metode periodik, jumlah persediaan ditentukan secara berkala (periodik) dengan melakukan perhitungan fisik dan mengalikan jumlah unit tersebut dengan harga satuan untuk memperoleh nilai persediaan yang ada pada saat itu.

2. Pencatatan Perpetual

Dalam metode perpetual, catatan persediaan selalu dimutakhirkan (update) setiap kali terjadi transaksi yang melibatkan persediaan, sehingga perusahaan selalu mengetahui kuantitas dan nilai persediaannya setiap saat.

2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 adalah pernyataan standar akuntansi persediaan. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Ruang lingkup pernyataan standar ini diterapkan dalam peyajian seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Poin penting dalam PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan, yaitu :

1. Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan dibahas dalam PSAP No. 05, yaitu diakui :

- a. Pada saat potensi manfaat masa depan diperoleh pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.
- c. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

2. Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan dibahas dalam PSAP No. 05 Paragraf 15, yaitu persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pada PSAP No. 05, penilaian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan :

- a. Metode sistematis seperti *FIFO* atau rata-rata tertimbang
- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

3. Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian (*use of goods*).
2. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
3. Jika persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang dipakai.
4. Jika persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan cek fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah

pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang dipakai.

4. Pengungkapan Persediaan

Laporan keuangan mengungkapkan :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020:9) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

3.2. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif yang berisi informasi yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka dan juga data kuantitatif yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung dan diukur yang diperoleh dari objek penelitian serta mengandalkan data primer yang merupakan jenis data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara dan survei di tempat penelitian. Menurut Sugiyono (2020:194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. dan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jurnal, buku dan bisa juga dalam bentuk dokumen lainnya, menurut Sugiyono (2020:193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Untuk sumber informasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode seperti, wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.3. Metode dan Proses Analisis Data

3.3.1 Metode Analisis

Untuk Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yang di mana data disusun, dikumpulkan, diinterpretasikan dan dianalisis untuk mampu menyajikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi, dengan cara menyajikan dan mengevaluasi hasil penelitian dari objek penelitian. yang berhubungan dengan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, serta menarik kesimpulan akhir dan saran terhadap pelaksanaan penelitian mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan pada Objek Penelitian.

3.3.2 Proses Analisis

Proses analisis data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terlibat dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, mengenai barang-barang persediaan pada Objek Penelitian, dan juga mengelola data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari pihak-pihak tersebut sampai menginterpretasikan hasil

pengolahan data tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Klasifikasi Persediaan

Klasifikasi persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung terbagi atas Barang Habis Pakai (BHP) dan Barang Tidak Habis Pakai (BTHP). Untuk pengelolaan persediaan dikelola oleh salah satu pegawai di bidang Kesekretariatan..

4.1.2 Pengakuan Persediaan

Pengakuan Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung diperoleh melalui permintaan dari setiap bidang operasional pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dan mengakui persediaan yang sudah dilakukan permintaan sudah diterima, dan juga pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung melakukan Cek Fisik (*Stock Opname*) yang dilakukan setiap akhir tahun, yaitu untuk mengetahui sisa stok persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dan juga untuk menyesuaikan pencatatan persediaan yang masuk maupun keluar dengan sisa stok yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Untuk Pencatatan Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung akan dicatat pada buku penerimaan barang dan setelah dicatat akan dibagikan pada setiap bidang-bidang yang sudah melakukan permintaan persediaan..

4.1.3 Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung diperoleh dari permintaan setiap bidang yang ada sesuai dengan sistem yang ada, kemudian pembelian dan pembayaran dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung sesuai dengan rencana pengadaan persediaan. Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung diperoleh dengan di mana untuk penentuan nilai atau harga dari persediaan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (HPT).

4.1.4 Beban Persediaan

Dalam setiap akhir tahun Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung akan membuat laporan operasional yang akan diserahkan pada Bendahara barang terhadap permintaan persediaan dengan jumlah yang dibutuhkan dan jumlah yang akan diterima serta seberapa banyak pemakaian persediaan dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung. Dengan melalui laporan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung akan melihat persediaan apa yang paling sering dibutuhkan, maka untuk permintaan persediaan pada tahun berikutnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung akan memperbanyak persediaan tersebut. Juga untuk pemakaian atau beban persediaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung mencatat hanya sesuai besarnya persediaan yang digunakan (*Use Of Goods*). Pencatatan persediaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dilakukan secara periodik di mana akan dilakukan pencatatan pada saat terjadi penambahan persediaan terhadap persediaan yang habis stok

4.1.5 Pengungkapan Persediaan

Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung mengungkapkan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengukuran persediaan, sesuai dengan uraian dalam pengukuran persediaan bahwa untuk penilaian persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung yaitu dengan cara tiap persediaan yang masuk pertama akan dikeluarkan atau dijual atau diserahkan juga yang pertama. Dari cara penilaian tersebut sama halnya dengan metode FIFO (*First In First Out*) di mana metode unit persediaan ini menghitung yang pertama kali masuk ke gudang akan keluar pertama juga. Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung juga mengungkapkan bahwa untuk penentuan nilai atau harga terhadap persediaan mengikuti harga pembelian terakhir yang ada pada rencana penganggaran kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengakuan Persediaan

Untuk Pengakuan Persediaan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung yaitu ketika persediaan atau barang telah tiba pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung beserta beberapa dokumen, seperti dokumen-dokumen yang memuat nilai atau harga, agar dapat diukur dan dapat diverifikasi. Jadi selama persediaan belum tiba di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung persediaan tidak akan diakui sebagai persediaan milik Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dan juga Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung juga melakukan pengecekan fisik (Stock Opname) setiap akhir bulan untuk menyesuaikan pencatatan persediaan yang masuk dan keluar dengan sisa stok persediaan di gudang. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 dalam hal pengakuan persediaan yaitu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah, serta pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Dalam PSAP 05 hal pengakuan persediaan yaitu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah, serta pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Dapat di lihat dari uraian di atas menunjukkan bahwa pengakuan persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung telah sesuai dengan PSAP No.5 dalam hal Pengakuan persediaan.

4.2.2 Pengukuran Persediaan

Pengukuran Persediaannya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam melakukan pengadaan persediaan yaitu diperoleh dengan permintaan dari tiap-tiap bidang yang memerlukan persediaan. Penilaian persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung yaitu dengan cara tiap persediaan yang masuk pertama akan dikeluarkan atau dijual atau diserahkan juga yang pertama. Daricara penilaian tersebut sama halnya dengan metode FIFO (First In Frist Out) dimana metode unit persediaan ini menghitung yang pertama kali masuk ke gudang akan dijual pertama juga.

Dalam PSAP 05 hal pengukuran persediaan yaitu persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO, dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Dapat di lihat dari uraian di atas menunjukkan bahwa pengakuan persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung telah sesuai dengan PSAP No.5 dalam hal Pengukuran Persediaan.

4.2.3 Beban Persediaan

Beban persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung untuk pemakaian atau bebanpersediaan dicatat sesuai besarnya persediaan yang digunakan (use of goods). Setiap tahun Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung membuat laporan operasional. Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam mencatat beban persediaannya dicatat secara periodik. Dalam PSAP Nomor 05 dalam hal beban persediaan terdapat dua metode pencatatan yang digunakan yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dapat di lihat dari uraian di atas menunjukkan ahwa beban persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung telah sesuai dengan PSAP No.5 dalam hal ini beban persediaan.

4.2.4 Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung diungkapkan dalam kartu stok, buku penerimaan barang dan buku pengeluaran barang; Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam pengukuran persediaan diungkapkan persediaannya diperoleh dengan nilai wajar dan untuk penentuan nilai persediaannya menggunakan Harga Pembelian Terakhir; Pengelolaan atau penilaian persediaan menggunakan metode FIFO.

Persediaan yaitu barang yang dipakai untuk membantu kegiatan operasional pemerintahan atau pada suatu instansi. Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung terdiri atas persediaan alat tulis kantor (barang habis pakai) dan (barang tidak habis pakai) seperti printer, komputer, dan lain sebagainya. Persediaan yang dalam kondisi rusak tidak akan digunakan lagi, dan akan dilakukan laporan pencatatan.

Dalam PSAP 05 pengungkapan persediaan yaitu mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, mengungkapkan penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan mengungkapkan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Dapat dilihat dari uraian di atas menunjukkan bahwa Pengungkapan persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung telah sesuai dengan PSAP No.5 dalam hal ini Pengungkapan persediaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada objek penelitian yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dan juga pembahasan yang dilakukan untuk menganalisis perlakuan akuntansi berdasarkan PSAP No. 05 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung, dapat ditarik kesimpulan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Klasifikasi Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dinyatakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05 di mana Klasifikasi Persediaan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung berupa Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Tak Habis Pakai seperti komputer, printer, dan lain sebagainya.
2. Pengakuan persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dinyatakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 05 di mana persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau penguasaannya berpindah
3. Pengukuran persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dinyatakan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.05, di mana pengukuran dan penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out) untuk dapat mengurangi risiko kerusakan atau keusangan pada persediaan dan juga Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung diperoleh dengan harga perolehan di mana untuk penentuan nilai atau harga dari persediaan menggunakan harga pembelian terakhir
4. Beban Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 di mana Beban Persediaannya dicatat sesuai besarnya persediaan yang digunakan dan setiap tahunnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung membuat laporan operasional serta persediaan dicatat secara periodik pada saat terjadi penambahan terhadap persediaan.
5. Pengungkapan Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dinyatakan telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 di mana persediaan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung diungkapkan dalam kartu stok, buku penerimaan barang, dan buku pengeluaran barang.

5.2. Saran

Saran untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung agar lebih memperhatikan

pengelolaan serta pembagian persediaan-persediaan yang didalam ada hal pengakuan, pengukuran, beban, dan pengungkapan persediaan, terlebih khusus untuk pencatatan persediaan agar terhindar atau tidak terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, akurat dan tranparan khususnya menyangkut laporan persediaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Sektor Publik*. (2022). Diambil kembali dari Sampoerna University.
- Alouw C. A., Sabijono H., Tangkuman S, J. (2022). Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No.05 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. *ejournal unsrat*
- Djoko Nestri K., Yandari A, D. (t.thn.). Analysis Accounting Treatment of Generic Medicine Inventories Based on PSAP 05 2010 at Dr. H. Moh. Anwar Sumenep Regency. Google Scholar 2020.
- Hasanah, N., & Fauzi,. (2017). Akuntansi pemerintahan. Bogor: In media.
- Hidayat W, Pramono B, Afdulloh M. (2019). System Analysis Of Inventory Information On Raw Material Companies . *Google Scholar*.
- Ismail Y. M., Karamoy H., Pusung R, J. . (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Ejournal Unsrat*.
- Kieso, Weygandt, & Warfield. (2018). *Intermediate Accounting* (IFRS Edition 2e ed., Vol. Chapter 1). New York.
- Pulu E., Sabijono H., Kapojos P, M,. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. *Ejournal Unsrat*.
- Purnairawan E., Sastroatmodjo S . (2021). *Pengantar Akuntansi*
- Rifai R. P, Tinangon J, J. (2017). Evaluasi Kebijakan Akuntansi Dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. ALFABETA, CV.
- Umboh A. D., dan Tinangon, J. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 Pada Dinas Kesehatan Manado. *Jurnal EMBA*.
- V, N. (t.thn.). Metode Pencatatan FIFO, LIFO, dan Rata-rata (Average). Diambil kembali dari Gramedia Blog.

Zulfayani A., Nurmilasari, Dahniar. . (2022). Perlakuan Akuntansi Persediaan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. *Jurnal
Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi).*